

FAITH-BASED DIPLOMACY NAHDLATUL ULAMA':
DISKURSUS PERDAMAIAN TIMUR TENGAH



Oleh:

MAHMUD HIBATUL WAFI
17200010055

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Kajian Timur Tengah

YOGYAKARTA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mahmud Hibatul Wafi, S.Ag.**
NIM : 17200010055
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 16 Mei 2019



Mahmud Hibatul Wafi, S.Ag.
NIM: 17200010055

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mahmud Hibatul Wafi, S.Ag.**

NIM : 17200010055

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum berlaku.

Yogyakarta, 16 Mei 2019



Mahmud Hibatul Wafi, S.Ag.
NIM: 17200010055



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-142/Un.02/DPPs/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : FAITH-BASED DIPLOMACY NAHDLATUL ULAMA: DISKURSUS PERDAMAIAN
TIMUR TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAHMUD HIBATUL WAFI, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 17200010055
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

a.n.

Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.
NIP. 19780924 000000 1 301

Penguji II

Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
NIP. 19761203 200003 1 001

Penguji III

Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
NIP. 19691017 200212 1 001

Yogyakarta, 23 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga
Pascasarjana
DIREKTUR



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

***FAITH-BASED DIPLOMACY NAHDLATUL ULAMA':
DISKURSUS PERDAMAIAN TIMUR TENGAH***

Yang ditulis oleh:

Nama : **Mahmud Hibatul Wafi, S.Ag.**
NIM : 17200010055
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A).

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Mei 2019

Pembimbing



Dr. Ibnu Burdah, M.A.

Abstrak

Mahmud Hibatul Wafi. 2019. *Faith-Based Diplomacy Nahdlatul Ulama': Diskursus Perdamaian Timur Tengah*. Tesis. Program Magister Interdisciplinary Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan pergerakan Nahdlatul Ulama (NU) di kancah internasional, terutama di Timur Tengah. Perkembangan tradisi hubungan internasional memberi peluang bagi NU sebagai *second-track diplomacy* untuk berpartisipasi merespon isu-isu internasional. Sebagai organisasi Islam terbesar, NU cukup diperhitungkan dalam perumusan kebijakan politik luar negeri (polugri) Indonesia terutama menyangkut ideologi keagamaan. Praktek diplomasi agama yang diperankan NU tidak terlepas dari kepentingan domestik Indonesia, di antaranya mengonsolidasi wacana Islam moderat dan perdamaian dunia. Penulis menempatkan teori *multi-track diplomacy*, *faith-based diplomacy* untuk mengartikulasi posisi NU sebagai aktor *non-state* yang terlibat aktif dalam merespons isu-isu internasional, terutama di kawasan Timur Tengah.

Konflik yang mendera Timur Tengah acap kali melibatkan legitimasi agama dalam prosesnya, membutuhkan alternatif baru untuk mendayagunakan agama sebagai resolusi konflik dan perdamaian. Konflik yang menahun telah menumbalkan citra Islam, berbagai diksi dan label subordinatif pun dilekatkan ke Islam. NU dengan otoritasnya punya tanggung jawab moral yang besar untuk memurnikan citra Islam di mata dunia. Pengarusutamaan dialog dan konferensi internasional yang diinisiasi oleh NU merupakan rangkaian dari upaya tersebut. Secara garis besar, NU menggunakan pendekatan kultural (*soft diplomacy*) –daripada politik, dalam menyikapi konflik global.

Penjajakan yang penulis lakukan atas tema ini menyimpulkan bahwa peran NU sangat signifikan dalam melancarkan gagasan-gagasan perdamaian (*positive peace*) melalui *soft-diplomacy*. Dampak konkrit bagi Indonesia dan Timur Tengah terlihat dari munculnya kesadaran kolektif terhadap pengarusutamaan forum-forum internasional, yang membahas urgensi Islam moderat bagi peradaban dunia. Dengan kata lain, penggalakan Islam moderat sebagai aset politik baik bagi Indonesia maupun Timur Tengah, mampu mengukuhkan peran *faith-based diplomacy* sebagai inspirasi *peacemeaking*. Temuan berikutnya menunjukkan bahwa kesinambungan antara norma, program, dan aktor

dalam mengimplementasikan Islam Nusantara sangat menentukan tingkat keberhasilan sebuah diplomasi dan jalinan kerja sama internasional, sehingga kepentingan nasional masing-masing negara dapat tersalurkan.

Kata kunci: *Nahdlatul Ulama, Diplomasi, Faith-based Diplomacy, Perdamaian, Timur Tengah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr. wb.

Tidak ada ungkapan yang patut dinyatakan di depan, selain bersyukur atas keridhaan Tuhan yang dengan izin-Nya, penulisan tesis ini dapat segera dirampungkan. Cahaya di atas cahaya yang senantiasa memberikan penerangan dalam hidup dan kehidupan. Solawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada pembawa suluh peradaban, Baginda Rasulullah Muhammad s.a.w., yang telah datang dengan Islam dan Al-Qur'an.

Tesis ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dari sejumlah pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu di sini. Namun begitu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., seluruh staf di Program Studi Pascasarjana Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Segala hormat dan terimakasih teruntuk Dr. Ibnu Burdah, M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik sekaligus pembimbing tesis ini. Masukan dan saran yang diberikan sungguh bernilai bagi penulis. Ungkapan serupa penulis sampaikan kepada segenap dosen yang telah menyuguhkan pengajaran selama penulis berada di bangku perkuliahan Kajian Timur Tengah, terutama Prof. Maghdy Baghmen, Dr, Dicky Sofjan, dan Dr. Ahmad Sahide. Serangkaian pengajaran dimaksud, baik pemikiran maupun keteladanan, menjadi pijar-pijar yang mencerahkan. Pun demikian dengan

Drs. Saleh Nur, MA., Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Kiai Irfan Sodik, Dr. Irwandra M.A., dan Dr. Hengki Firmanda, yang menjadi “inspirasi” dalam perjalanan akademik penulis.

Terima kasih tiada terhingga dihaturkan kepada yang mulia kedua orang tua penulis, yakni Ayahanda Haris dan Ibunda Junaryati, perjuangan dan restu beliau berdua menjadi kekuatan utama dalam penulisan tesis ini. Demikian juga halnya saudara-saudaraku yang tiada henti menyumbangkan semangat, Mahmud Hawali Zul Waqor dan Mahmud Dzakiron. Kepada Tuhan penulis menengadahkan tangan, berharap ridha seraya memohon ampunan, semoga proses penulisan ini diterima sebagai amal kebaikan dan bermanfaat bagi semua. Semoga tesis ini menjadi satu mata rantai perjalanan intelektual dan spiritual penulis, juga menjadi satu kontribusi keilmuan dalam menorehkan tinta pengetahuan sebagaimana diserukan Tuhan kepada insan. Amin.

Yogyakarta, 29 Mei 2019

Penulis,

Mahmud Hibatul Wafi, S.Ag.
NIM. 17200010055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Kerangka Teori	15
D. Metodologi Penelitian	23
H. Sistematika Pembahasan	25

BAB II : NAHDLATUL ULAMA DAN DIPLOMASI GLOBAL

A. Nahdlatul Ulama dan Politik Internasional	27
B. Menangkal Arus Ekstremisme	42
C. Islam Nusantara Sebagai <i>Soft-Diplomacy</i>	50
D. Perdamaian dan Nirkekerasan Berbasis Agama	64

BAB III : INISIATIF-INISIATIF DIPLOMASI

A. PCINU: Jaringan NU di Timur Tengah	74
B. Nahdlatul Ulama dan Transformasi Konflik Palestina-Israel	85
C. Dialog Perdamaian Transnasional	96
1. International Conference of Islamic Scholars (ICIS)	97
2. Consultation Forum for Peace in Afghanistan	103
3. ISOMIL	107
4. Bogor Declaration of Peace	113
D. Diplomasi Digital: NU Online	117
E. Bayt Rahmah: Gerakan Diplomasi Damai	120
F. Filantropi NU-CARE LAZISNU.....	127

BAB IV: DARI *FAITH* MENUJU GERAKAN DIPLOMASI DAMAI

A. PCINU dan Norma Islam Nusantara	135
B. Bayt Ar-Rahmah: Diplomasi Perdamaian	138
C. Signifikansi Diplomasi Filantropi	140
D. Dialog Internasional dan Kepentingan Nasional	142

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	149
B. Saran	152

DAFTAR PUSTAKA	153
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	167
--------------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	168
-----------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tradisi Hubungan Internasional (HI) keterlibatan individu atau kelompok (*non-state*) berperan penting dalam menjelaskan fenomena internasional di tengah-tengah kemajuan teknologi dan informasi. Hal ini memberi konsekuensi bagi setiap individu untuk bertanggung jawab dalam dialektika global. Selain itu, juga menjadi penanda eksisnya pendekatan konstruktivisme dalam hubungan internasional. Para penganut cara pandang konstruktivisme dalam studi HI mengadopsi premis konstruksi sosial (*social construction*) bahwa individu dan kelompok secara aktif menciptakan lingkungan tempat mereka berinteraksi –dari level mikro hingga makro, walaupun mereka tidak mampu mengatur seluruh kejadian dan faktor eksternal seperti yang diinginkan. Sehingga dalam konteks politik global tindakan para aktor dimungkinkan, dan pada waktu bersamaan dibatasi, melalui berbagai kondisi serta institusi yang sudah berevolusi secara historis. Cara pandang konstruktivis mengenai karakter hubungan antaraktor internasional demikian dikonseptualisasikan oleh Alexander Wendt (1992) menjadi sebuah proposisi ‘anarchy is what states make of it’, yang kemudian menjadi ciri khas dan label paradigma konstruktivisme HI.¹

¹ Vinsensio Dugis (Ed.), *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*, Surabaya: CSGS, 2016, 148.

Dengan kata lain, konstruktivisme merupakan wujud relasi politik internasional yang berangkat dari aktivisme individu terhadap kebutuhan sosial dan norma yang dianut. Aktivisme tersebut menggiring individu untuk berinteraksi dengan warga dunia lainnya. H. J. Morgenthau menyatakan, “Betapapun tidak sempurnanya dari sudut pandang nasional, dunia ini adalah hasil dari kekuatan-kekuatan yang melekat pada hakikat manusia”.²

Hubungan internasional sebenarnya adalah hasil interaksi antar berbagai kelompok kecil yang berada di berbagai negara. Hubungan Indonesia-Mesir, misalnya, adalah hubungan antara kelompok-kelompok yang berada di pucuk pimpinan kedua negara. Oleh karena itu, unit analisis yang menjadi perhatian utama dalam kajian HI adalah interaksi yang terkonstruksi antara organ-organ di setiap negara demi mewujudkan kepentingan bersama.³ Dalam perkembangannya, negara tidak lagi menjadi poros utama dalam membangun relasi internasional, kontribusi aktor-aktor *non-state* juga sangat dominan dalam kancah internasional. Dapat dipahami adanya peralihan orientasi dalam studi HI, di antaranya ditandai dengan pengadopsian pertimbangan-pertimbangan agama dalam kebijakan internasional.

Keterlibatan individu/kelompok dalam percaturan HI menonjolkan pendekatan mikro yang melibatkan kenyataan bahwa karakteristik individu/kelompok sangat kompleks dan dinamis.⁴ Di antara faktor yang paling melekat adalah agama. Bahkan menjadi faktor yang sangat menentukan bagi jalan

² Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations*, New York: Knopf, 1978, 3

³ J. A. Bill, R. L. Hardgrave, *Comparative Politics*, Ohio: Merrill, 1973, 121.

⁴ Mohtar Masoed, *Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: PAU-SS UGM, 1989, 2.

pikiran dan kehidupan. Oleh karena itu, dari agama pulalah harus ditelusuri antitesa dari konflik, kontradiksi, paradoks, yang selalu menyertai kehidupan manusia.

Agama sejak lama diasingkan dalam studi dan praktek HI modern. Dalam perspektif sejarah diplomasi Eropa, perjanjian Westphalia 1648 disebut sebagai momentum awalnya. Sebaliknya, praktek *real politics* atau *power politics* (*match politics*) berbasis kepentingan lebih mendominasi. Ini bisa dicermati dari fakta bahwa realisme politik internasional yang menjadi perspektif dominan hubungan internasional. Meski demikian, sebenarnya sepanjang sejarah, agama membentuk identitas politik signifikan dan memainkan peran penting dalam politik global.⁵

Douglas Johnston dalam dua karya besarnya: *Faith-Based Diplomacy: Trumping Realpolitik* (2003) dan *Religion, the Missing Dimension of Statecraft* (1994), menuturkan bahwa agama memiliki peran positif yang cukup besar dalam meminimalisir dan mereduksi konflik, serta berpotensi menggiring perubahan sosial yang adil dan demokratis.⁶

Selanjutnya, Shireen T. Hunter dalam artikel *Religion and International Affairs: From Neglect to Over-Emphasis* menyebut bahwa agama memengaruhi hubungan internasional dengan cara yang sama dengan sistem nilai dan ideologi yang lain yaitu dengan memengaruhi perilaku negara dan aktor *non-state*. Dengan kata lain, agama berperan sama dengan ideologi-ideologi lain untuk melegitimasi keputusan dan kebijakan serta mengumpulkan dukungan populer bagi kebijakan

⁵ Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Raffery, *Pengantar Politik Global*, Bandung: Nusamedia, 2012, 859.

⁶ Douglas Johnston, "Faith-Based Diplomacy: Bridging the Religious Divide", *The Wheatley Institution; International Affairs*, US: Brigham Young University, 2009, 4.

itu.⁷ Jika agama sebegitu berpengaruh dalam dinamika hubungan internasional, maka citra agama yang distorsif dan manipulatif sebagai biang konflik dan perang tentu bisa diganti-ubahkan, meminjam ungkapan Douglas Johnston, “*the best antidote for bad theology is good theology*”.⁸

Relasi antara agama dan HI sebagai suatu jalinan yang secara konstitutif dan *endogenous* dalam sejarah seharusnya sudah ada sejak awal perkembangan tradisi HI. Peran agama secara umum menentukan tradisi HI Barat sekuler dalam dimensi norma, etika politik, norma, moral, dan hukum internasional, sehingga Kristen, Yahudi, Islam dan Hindu sebagai agama pun tak mungkin lepas dari dinamika teoretisasi HI. Wight menjelaskan secara artikulatif tentang peradaban Islam, Kristen, dan Yahudi serta Hindu sebagai bagian dari tradisi yang cukup berperan dalam studi HI. Ungkapan Wight ini kemungkinan dipengaruhi oleh prinsip pluralisme dalam tradisi HI Barat sekuler *English School*. Wight yang sangat dipengaruhi nilai-nilai Kristen mengakui Islam sebagai tradisi HI yang hampir terkubur atau terpinggirkan oleh imperialisme HI Barat sekuler.⁹

Konflik-konflik yang mengitari kawasan Timur Tengah sebagian besar bermotif keagamaan. Perang antarsekte adalah pemandangan yang sudah lazim di kawasan padang pasir tersebut. Seharusnya upaya memosisikan agama beserta *hujjah-hujjahnya* sebagai resolusi konflik mesti diintensifkan oleh berbagai kalangan. Jika agama selalu dieksploitasi dan dikooptasi sebagai landasan konflik, juga sangat mungkin bagi agama digunakan dalam konteks *peace-making*.

⁷ Andi Purwono, “Organisasi Keagamaan Dan Keamanan Internasional”, *Jurnal Politik Profetik*, vol. 2 no. 2 2013, 3.

⁸ Douglas Johnston, 12.

⁹ Martin Wight, *International Theory: Three Traditions* (USA: Hollmes & Meier, 1991), 84.

Diskursus agama sebagai resolusi bisa hadir dalam wujud dan strategi yang beragam, juga melibatkan aktor-aktor lintas disiplin dan negara.

Namun sejauh ini, kecenderungan melihat agama dan kelompok agama dalam dimensi sumber konflik terlalu besar porsinya. Padahal sebagaimana diungkapkan Scott Appleby, “*The facts suggest a dual legacy of organized religion, a tremendous potential for violence as well as extraordinary resources for reconciliation*”.¹⁰ Artinya, sebenarnya telah tumbuh pula kesadaran tentang banyaknya ruang positif yang dimainkan oleh agama dalam menciptakan rekonsiliasi dan harmonisasi.

Douglas memandang bahwa buntunya proses mediasi dan rekonsiliasi konflik, terutama di negara-negara Timur Tengah, disebabkan absennya ruang dialog lintas agama yang melibatkan pemuka-pemuka agama. Jika pun ada, tidak berlangsung secara masif dan *sustainable*. Dari penjajakan empirik yang dilakukan Douglas di beberapa wilayah Timur Tengah –Afghanistan, Sudan, dll, ia melihat bahwa proses dialog sangat mungkin dilakukan asalkan masing-masing sekte mendahulukan aspirasi kolektif (keadilan, kemanusiaan, dan *welfare*).¹¹

Kemungkinan-kemungkinan inilah yang ditangkap sebagai sinyal positif oleh Nahdlatul Ulama (NU) dengan mempersuasi norma Islam Nusantara dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa NU beserta karakter keberagamaan yang dianutnya merupakan aset diplomasi terbaik untuk membentuk citra Republik Indonesia di kalangan internasional. Kesadaran

¹⁰ R. Scott Appleby dalam *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation*, (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2000), 429.

¹¹ Douglas Johnston, 6-9.

tersebut terus berlanjut dengan mengonsolidasi dan mempersuasi norma Islam Nusantara di ruang lingkup regional. Pada Desember 2018 silam, misalnya, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri bersama PBNU mengadakan seminar internasional yang menyorot peran Islam Nusantara dan Diplomasi RI di UIN Sunan Ampel Surabaya.¹² Agenda ini meneguhkan norma Islam Nusantara sebagai *platform* utama Kemenlu dalam merumuskan kebijakan luar negeri Indonesia.

NU dan gagasan-gagasannya yang mendunia sudah tidak diragukan lagi sepak terjangnya di kancah internasional. Di antara gagasan besar yang ditawarkan NU adalah konsep Islam moderat dan Islam Nusantara. Keduanya mengandung wacana bernas seputar *tawassuth*, *tasammuh*, *tawazzun*, *i'tidal*, dan *tasyawur*. Wacana tersebutlah yang menjadi senjata NU dalam urusan diplomasi dan rekonsiliasi ke negara-negara Timur Tengah, khususnya. Pada level global, prinsip-prinsip itu juga menuntun peran aktif yang sejalan dengan nilai kemanusiaan. NU tampil ke kancah global dengan mengampanyekan *Islam rahmatan lil alamin*. Makna dari rahmat bagi seluruh alam ini bukan hanya untuk umat Islam, tetapi bagi seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi.¹³ Apa yang diikhtiarkan NU dengan wacana bernasnya tersebut tidak hanya terbatas mengenalkan model Islam Nusantara (Indonesia), tetapi juga wujud *soft-diplomacy* yang merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri Indonesia, serta mengamalkan prinsip diplomasi Indonesia yang ‘bebas-aktif’.

¹² <http://m.republika.co.id> “Kemenlu Islam Nusantara Aset Diplomasi” (diakses 27 Mei 2019).

¹³ Andi Purwono, “Organisasi Keagamaan dan Keamanan Internasional: Beberapa Prinsip dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (Nu) Indonesia”, *Jurnal Politik Profetik*, Volume 2 Nomor 2 2013, 9.

Demikian pula dalam pandangan KH. Hasyim Muzadi upaya menciptakan dunia yang lebih damai dan adil memang tidak akan bisa dicapai tanpa kemitraan yang erat antara ulama dan *umara*. Oleh karena itu, PBNU bersama komponen pemerintah bahu-membahu mendiseminasi narasi Islam yang damai sebagai tanggung jawab moral untuk mewujudkan perdamaian dunia. Tanggung jawab di sini bisa dipahami beroperasinya norma sebagai pendorong tindakan.¹⁴ Perlu dicatat bahwa norma tidak muncul di ruang hampa, tentu ada faktor-faktor yang melatarbelakanginya. NU dan norma Islam Nusantara menemukan momentum di saat dunia mulai diserbu oleh demam terorisme dan ekstremisme. Dari sinilah kemudian NU bersama pemerintah mempersuasi narasi Islam moderat sebagai antitesa dari model keberislaman konservatif dan radikal.

Menurut Andi Purwono, NU mulanya mensosialisasikan wacana Islam Nusantara kepada masyarakat sebelum mempersuasi dan mendiskusikan program-program bersama pejabat Kementerian Luar Negeri. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia mengadopsi norma Islam Nusantara sebagai kebijakan luar negeri Indonesia. Meskipun Finnemore dan Sikkink menyebut bahwa aktor transnasional adalah aktor utama yang menyebabkan pemunculan norma, namun elite Kementerian Luar Negeri juga berperan penting dalam pembentukan atau pemunculan norma.¹⁵

¹⁴ Andi Purwono, "Islam Moderat Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi", Yogyakarta: UGM, Disertasi, 2018, 114.

¹⁵ Andi, 135. Lihat juga: Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, International Norm Dynamics and Political Change, *International Organization*, vol. 52, no. 4, *International Organization at Fifty: Exploration and Contestation in the Study of World Politics*, 1988.

Dari penilaian publik internasional¹⁶, Islam Indonesia menyitrakan wajah yang damai dan karakter yang menarik sebagai *rahmatan li al-‘alamin*, jauh dari radikalisme dan ekstremisme. Bukan hanya umat Islam wilayah Timur yang mengagumi pendekatan keagamaan Indonesia, Barat pun mengakui Indonesia sebagai model alternatif bagi kerukunan antarumat beragama di permukaan bumi ini.¹⁷ Bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, umat Islam Indonesia lebih menyukai pemahaman pluralis tentang agama daripada pandangan eksklusif dan fundamentalisme. Melalui sejarah pengalaman yang panjang membangun kerukunan antaragama, antarsuku dan antarbudaya, Indonesia bisa menjadi *role model* bagi dunia Islam maupun dunia secara umum.¹⁸ Jika harapan ini terealisasi, Islam Indonesia akan menjadi antitesis terhadap citra Islam yang sempit dirusak oleh ambisi segelintir orang (kelompok) yang memilih jalan kekerasan.¹⁹ Modal sosial tersebut membuka peluang bagi proses internalisasi gagasan Islam Nusantara ke dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Dengan begitu, citra Islam yang moderat dan damai mengkristal di tubuh Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sendiri menegaskan

¹⁶ Apresiasi mengenai Islam Nusantara oleh publik internasional terlihat dari berita-berita yang telah dipublikasi di media-media berkelas internasional seperti, Harian *Al-Arab*, “Islam Nusantara Madkhal Indonesia li Mujtama' Mutasamih” (Islam Nusantara adalah gerbang Indonesia menuju masyarakat toleran), harian terbesar di Mesir *Al-Ahram* dan *al-Masry al-Youm* juga memotret Islam Indonesia yang ramah dan toleran, khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

¹⁷ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1998, 335.

¹⁸ Ibid., 348.

¹⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah*, Bandung: Mizan, 2009, 244.

bahwa Islam moderat sebagai jenis Islam yang mempromosikan dialog antariman dan meyakini bahwa agama bisa hidup berdampingan secara damai.²⁰

Sejauh ini partisipasi NU dalam diplomasi global dimulai sejak pengiriman delegasi Komite Hijaz ke pemerintah Saudi dalam rangka menjamin toleransi dalam praktek beragama. Langkah ini merupakan pelopor perjuangan kebebasan bermadzhab di Mekah, sehingga umat Islam sedunia bisa menjalankan ibadah sesuai dengan madzhab masing-masing. Di era reformasi, terlihat upaya NU bersama Departemen Luar Negeri RI dengan aktif menggelar rangkaian *Interfaith Dialogues* pada periode 2004-2006. Secara kelembagaan NU juga membentuk *International Conference of Islamic Scholars* (ICIS) atau Konferensi Ulama dan Cendekiawan Muslim Sedunia. Beberapa konferensi yang berhasil diselenggarakan antara lain, pertama pada 23-25 Februari 2004, yang kedua pada 20-23 Juni 2006, dan yang ketiga 29 Juli-1 Agustus 2008. Upaya ICIS bisa disebut sebagai agenda 'globalisasi Islam' *Rahmatan Lil'alam*.²¹ Melalui lawatan-lawatan internasional, kampanye ini juga disebarkan ke Syiria, Libanon, Iran, Palestina- Israel, Pakistan, Vatikan, Uni Eropa, Inggris, Jerman, Australia, Amerika, dan PBB.²²

Adapun strategi yang digunakan antara lain dengan menjelaskan tentang Islam *rahmatan lil'alam* sehingga mengurangi kesalahpahaman dan *islamophobia*, *shuttle diplomacy* secara bergiliran dan berurutan menemui dan

²⁰ Umar Hadi and Abdul Mu'ti et.al., *Islam in Indonesia: A to Z Basic Reference* (Jakarta: Direktorat Diplomasi Publik, 2011), 31.

²¹ Hasyim Muzadi, *Islam Rahmatan Lil'alam Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia (Perspektif Nahdlatul Ulama)*, dalam pidato ilmiah penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam Peradaban Islam dari IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Desember 2006.

²² Andi Purwono, 9-11.

mendorong para pihak bertikai untuk kembali ke jalur dialog dan negosiasi (Palestina-Israel), menemui para pihak bertikai dan mendorong dialog demi meredam konflik sektarian Sunni-Syiah (Suriah, Libanon, Iran) dengan mengedepankan *ukhuwah islamiyah*, menggalang dukungan antiserangan George W. Bush ke Irak (Vatikan, Uni Eropa), mendesak badan internasional untuk memfasilitasi dan memediasi dialog antarperadaban (PBB), mengirim tenaga-tenaga muda dari pesantren (ke Inggris) mengikuti pelatihan manajemen pendidikan dan studi lanjut sekaligus dalam rangka pengenalan budaya lain.²³

Langkah lainnya dalam konteks globalisasi Islam *rahmatan lil alamin* adalah pembukaan kantor cabang istimewa NU di berbagai negara baik Timur Tengah (Mesir, Suriah, Sudan, Kuwait, Turki) maupun Barat (Inggris, Amerika dan Kanada, Australia, Jepang, Belanda, Jerman, Turki) dan Asia (Malaysia, Taiwan). Keberadaan mereka bukan semata karena ada orang NU di luar negeri, namun juga karena keinginan mempraktekkan dan menunjukkan Islam *ala* NU. Bahkan sebagian secara tegas dimaksudkan sebagai upaya untuk menjembatani peradaban Islam-Barat.²⁴

Upaya-upaya yang telah dilakukan NU bagi perdamaian Timur Tengah tersebut adalah bagian dari *faith-based diplomacy*. Diplomasi *second track* ini sebagaimana ditulis Brian Cox and Daniel Philpott dalam *Faith-based Diplomacy: An Ancient Idea Newly Emergent*, “*Faith-based diplomacy is oriented towards the divine. That is its most central and distinctive principle. Its motivating*

²³ Ibid., Lih. <http://www.nu.or.id/post/read/8643/peran-nahdlatul-ulama-dalam-konflik-timur-tengah>.

²⁴ Ibid.,

*vision of politics, its assumptions about human nature and the political order, and the norms that govern its conduct all arise from an understanding of the nature and activity of the divine—understood in some traditions as a personal God and in other traditions as the source of meaning and existence”.*²⁵ Hal ini tercermin dari proses ijtihad yang dilakukan NU untuk mendasari konsep diplomasinya tersebut dengan mengambil dalil-dalil teologis sebagai pesan perdamaian dan kemanusiaan.

Perumusan pesan perdamaian tersebut dengan berbagai konsep yang muncul setelah itu –Islam Nusantara, Islam *rahmatan lil alamin*, dsb, merupakan manifestasi dari norma atau nilai yang tertanam di tubuh NU, kemudian mengonstruksi preferensi, tujuan bersama, dan tindakan dalam hubungan internasional. Hal ini dalam pandangan konstruktivisme, kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan menunjukkan bahwa norma tersebut eksis. Dampaknya, apa yang dinilai bertentangan dengan praktek Islam yang moderat akan ditolak karena dinilai tidak layak. Sebaliknya, tindakan-tindakan umat Islam yang terus-menerus menampilkan nilai keadilan, *wasathiyyah*, dan toleransi akan terus dikonservasi.²⁶

Dengan demikian, menginventarisir serta menganalisis dampak yang hadir dari interaksi internasional NU bagi perdamaian Timur Tengah menjadi orientasi utama dari penelitian ini. Selanjutnya, mengeksplanasi langkah *faith-based diplomacy* NU, berikut tantangan dan peluang bagi perdamaian Timur Tengah.

²⁵ Brian Cox and Daniel Philpott, “Faith-based Diplomacy: An Ancient Idea Newly Emergent”, *The Brandywine Review of Faith & International Affairs*, vol 1, no. 2, 2003, 32.

²⁶ Andi Purwono, “Islam Moderat Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi”, Yogyakarta: UGM, Disertasi, 2018, 81.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana langkah-langkah *faith-based diplomacy* NU dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah?
2. Bagaimana dampak atau implikasi diplomasi NU terhadap negara-negara Timur Tengah dan juga bagi Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini di antaranya adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta mampu menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan formulatif dan koordinatif dalam merumuskan strategi diplomasi berbasis agama oleh Nahdlatul Ulama di kancah internasional.
2. Untuk menelaah mekanisme Nahdlatul Ulama dalam memediasi konflik di Timur Tengah, dan posisi keislaman Indonesia di tingkat internasional.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut,

a. Kegunaan Teoritis

1. Memberikan manfaat dalam bentuk sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hubungan internasional pada umumnya dan kajian seputar dinamika Timur Tengah pada khususnya yang berkaitan dengan *faith-based diplomacy*.
2. Untuk pengembangan ilmu, terutama bagi penulis sendiri dalam menekuni dan mendalami problem-problem yang terjadi di Timur Tengah, serta untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam merencanakan,

mempersiapkan dan melaksanakan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, baik itu pemerintah, ataupun masyarakat agar mengetahui kontribusi Nahdlatul Ulama (NU) dalam mengampanyekan gagasan Islam Nusantara –sekaligus *soft diplomacy* bagi Indonesia– demi terwujudnya perdamaian di kawasan Timur Tengah.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk melihat perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian terdahulu, di sini akan dimuat beberapa tulisan yang sekiranya mengangkat pembahasan serupa. Tulisan-tulisan dimaksud di antaranya adalah, pertama, konsep *faith-based diplomacy* dan manifestasinya bagi rekonsiliasi konflik: dua penelitian dari Brian Cox dan Daniel Philpott, *Faith-based Diplomacy: An Ancient Idea Newly Emergent* oleh dalam *The Brandywine Review of Faith & International Affairs*,²⁷ dan *What Faith-Based Diplomacy Can Offer in Kashmir*,²⁸ Jonas Jonson, *Faith-related diplomacy: An introduction to Nathan Soderblom*²⁹, Douglas Johnston, *Faith-Based Diplomacy: Trumping Realpolitik*³⁰

²⁷ Brian Cox and Daniel Philpott, “Faith-based Diplomacy: An Ancient Idea Newly Emergent”, *The Brandywine Review of Faith & International Affairs*, vol 1, no. 2, 2003.

²⁸ Brian Cox and Daniel Philpott, “What Faith-Based Diplomacy Can Offer in Kashmir”, *United States Institute of Peace*, no. 55, 2006.

²⁹ Jonas Jonson, “Faith-related Diplomacy: An introduction to Nathan Soderblom”, *Theology*, vol. 120 (1), 2017.

³⁰ Douglas Johnston, *Faith-Based Diplomacy: Trumping Realpolitik* (London: Oxford University Press, 2003)

dan *Faith-Based Diplomacy: Bridging The Religious Divide*³¹, dan penelitian Fredy Munthe, *Religious Movements in Humanitarian Issue: The Emergence of Faith-Based Organizations (FBO) in Diplomacy Sphere*.³²

Selanjutnya, penelitian yang mengupas diplomasi agama (*multi-track diplomacy*) sebagai diskursus studi HI, dan realisasinya dalam mewujudkan dialog antaragama: *Multi-track diplomacy: A Positive Approach to Peace*³³ dan *The Institute for Multi-Track Diplomacy*³⁴ oleh John W. McDonald, Jonathan Fox, *The Multiple Impacts of Religion on International Relations: Perceptions and Reality*, Jacob Bercovitch and Ayse Kadayifci, *Religion and Mediation: The Role of Faith-based Actors in International Conflict Resolution*³⁵, *Interreligious Dialogue and Cultural Diplomacy in the Middle East* oleh Thomas Scheffler,³⁶

Adapun karya-karya ilmiah yang berbicara seputar Nahdlatul Ulama (NU) dan manuver-manuvernya dalam bingkai politik dan kenegaraan, di antaranya: *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*³⁷, *Anatomi Konflik: NU, Elite Islam dan Negara*³⁸, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*³⁹, *Nahdlatul Ulama dan*

³¹ Douglas Johnston, "Faith-Based Diplomacy: Bridging The Religious Divide", *Institute for Public Policy and Bringham Young*, 2009.

³² Fredy Munthe, "Religious Movements in Humanitarian Issue: The Emergence of Faith-Based Organizations (FBO) in Diplomacy Sphere", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 5 Edisi 2, 2017.

³³ John W. McDonald, *Multi-track Diplomacy: A Positive Approach to Peace*, Arlington: Institute for Multi-Track Diplomacy, 2014.

³⁴ John W. McDonald, "The Institute for Multi-Track Diplomacy", *Journal of Conflictology*, vol. 3, issue 2, 2012.

³⁵ Jacob Bercovitch and Ayse Kadayifci, "Religion and Mediation: The Role of Faith-based Actors in International Conflict Resolution", *International Negotiation*, 14, 2009.

³⁶ Thomas Scheffler, "Interreligious Dialogue and Cultural Diplomacy in the Middle East", *Congress of DAVO*, 2003.

³⁷ M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya* (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996)

³⁸ Laode Ida, *Anatomi Konflik: NU, Elite Islam dan Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

³⁹ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LkiS, 1998).

*Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*⁴⁰, *Organisasi Keagamaan dan Keamanan Internasional: Beberapa Prinsip dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia*⁴¹.

Sedangkan penelitian-penelitian terdahulu yang secara spesifik mengkaji NU dan posisinya dalam diplomasi agama, yakni: *Peran Mediasi Nahdlatul Ulama Dalam Meredam Konflik di Thailand*,⁴² ditulis oleh Arifi Saiman⁴³. Penelitian ini memang menjabarkan tentang terobosan NU di kancah internasional sebagai agen *second-track diplomacy*, namun yang menjadi benang merah dengan kajian penulis adalah fokus penelitian. Arifi Saiman lebih terpusat pada kawasan Thailand, sedangkan penulis memusatkan penelitian pada wilayah Timur Tengah. Selain itu, penulis juga mempresisi penelitian pada insiatif perdamaian berdasarkan *multi-track diplomacy* yang telah dirumuskan Douglas Johnston, kemudian menjelaskan strategi NU dalam mengurai kompleksitas persoalan yang ada di Timur Tengah. Selanjutnya, *Islam Moderat Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi*⁴⁴ ditulis oleh Andi Purwono. Dalam tulisannya tersebut, Andi menggambarkan signifikansi Islam moderat dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia sebelum dan sesudah reformasi. Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme, penelitian tersebut menegaskan

⁴⁰ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998).

⁴¹ Andi Purwono, "Organisasi Keagamaan dan Keamanan Internasional: Beberapa Prinsip dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia", *Jurnal Politik Profetik*, 2013.

⁴² Arifi Saiman, "Peran Mediasi Nahdlatul Ulama Dalam Meredam Konflik di Thailand", Bandung: Universitas Padjadjaran, Disertasi, 2013.

⁴³ Director of the Centre for Policy Analysis and Development on Asia Pacific and Africa Regions at the Foreign Ministry.

⁴⁴ Andi Purwono, "Islam Moderat Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi", Yogyakarta: UGM, Disertasi, 2018.

kemunculan Islam moderat dalam politik luar negeri Indonesia sangat berkaitan dengan peran agensi pengusungnya, dalam hal ini adalah NU. Pembacaan terhadap proses internalisasi norma Islam moderat dan kebijakan luar negeri Indonesia menjadi sorotan utama. Namun, penelitian ini masih minim mengeksplorasi apresiasi dan respon internasional terhadap norma Islam moderat. Dengan demikian, celah tersebut menjadi ranah telaah bagi penulis untuk dipaparkan dan dirangkum lebih lanjut dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Multi-track Diplomacy

Negara sebagai *first track diplomacy* dan NU sebagai *second track diplomacy* telah menciptakan hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. NU merasa diuntungkan karena diberi akses oleh negara sementara Republik Indonesia juga diuntungkan karena citra moderasi Islam Nusantara sebagai identitas nasional dikenal oleh mayoritas internasional. Relasi yang terbentuk di antara kedua entitas ini melahirkan aksi-aksi yang membawa norma-norma agama dalam prosesnya.

Norma agama dalam proses mediasi, menurut Bruce Nichols, dapat membuka jendela ke realitas emosional dan spiritual yang lebih dalam dari mereka yang terlibat dalam konflik dan kehidupan negosiator sendiri.⁴⁵ Oleh sebab itu, sinergitas aktor-aktor yang terkait dalam diplomasi, baik dari

⁴⁵ Bruce Nichols, "Religious Conciliation between the Sandinistas and the East Coast Indians in Nicaragua," in Douglas Johnston and Cynthia Sampson (editor) *Religion, the Missing Dimension of Statecraft*, New York: Oxford University Press, 1994, 74.

pemerintah maupun organisasi agama, sangat menentukan keberlangsungan dan keberterimaan nilai-nilai yang diusung.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah *multi-track diplomacy* yang akan terfokus pada jalur ke tujuh –dari sembilan jalur- yaitu, *faith-based-diplomacy* (agama). Konsep *multi-track diplomacy* ini berkembang dalam beberapa periode. Pada 1981 Joseph Montville menuliskan sebuah artikel tentang konsep jalur pertama dan kedua. Kemudian, 1989, McDonald mengembangkan menjadi lima jalur dan pada akhirnya John McDonald dan Louise Diamond mengembangkan konsep ini jauh lebih luas menjadi sembilan jalur yang termaktub dalam buku yang berjudul *Multi-track Diplomacy, A Systems to Approach Peace*.⁴⁶

Adapun penjabaran kesembilan jalur diplomasi tersebut:⁴⁷ *Pertama*, pemerintah, atau perdamaian melalui diplomasi. Ini merupakan diplomasi resmi dunia, pembuat kebijakan, dan pencipta kedamaian. Hal ini ditunjukkan melalui aspek-aspek formal dari pemerintah. *Kedua*, nonpemerintah, atau perdamaian melalui resolusi konflik. Ini merupakan upaya profesional yang berasal dari nonpemerintah untuk menganalisis, mencegah, memecahkan, dan mengelola konflik internasional.

Ketiga, bisnis, atau perdamaian melalui perdagangan. Ini merupakan bidang bisnis dan efek potensial dan aktual dalam perdamaian melalui pengadaan peluang ekonomi, persahabatan dan pemahaman internasional, komunikasi jalur

⁴⁶ John McDonald and Louise Diamond, *Multi-track Diplomacy: A System Approach to Peace*. West Hartford: Kumarian Press, 1996.

⁴⁷ John McDonald and Louise Diamond, 67.

informal, dan dukungan dari kegiatan perdamaian lainnya. *Keempat*, warga sipil, atau perdamaian melalui pendekatan individu. Jalur diplomasi ini membuka ruang bagi warga sipil untuk terlibat dalam kegiatan damai dan perkembangan melalui diplomasi masyarakat, program pertukaran, organisasi sosial swasta, organisasi *non-state*, dan kelompok-kelompok kepentingan khusus. *Kelima*, penelitian, pelatihan, dan pendidikan, atau perdamaian melalui pembelajaran. Program penelitian (*research*) berhubungan dengan program universitas, dan pusat penelitian khusus; program pelatihan merupakan bagian proyek kerja sama antara dua negara atau lebih seperti negosiasi, meditasi, resolusi konflik, dan sebagainya; dan program pendidikan: pemberdayaan di sektor pendidikan seperti, menyediakan peluang bagi warga asing untuk mengenyam pendidikan di sekolah atau universitas berupa beasiswa pendidikan, bantuan penelitian, dan lain-lain.

Keenam, aktivisme, perdamaian melalui advokasi. Jalur ini mencakup bidang perdamaian dan lingkungan aktivisme dalam beberapa isu seperti bencana, hak asasi manusia, keadilan sosial dan ekonomi, dan advokasi untuk kelompok-kelompok kepentingan khusus yang berkaitan dengan suatu kebijakan yang spesifik dari pemerintah. *Ketujuh*, agama, perdamaian melalui kepercayaan dalam bertindak. Ini mengkaji kepercayaan dan orientasi tindakan damai dari kelompok spiritual dan komunitas-komunitas agama dan pergerakan berdasarkan moral seperti paham cinta damai, humanisme, dan antikekerasan. *Kedelapan*, pendanaan, perdamaian melalui penyediaan sumber daya. Ini merujuk kepada komunitas pendanaan, seperti yayasan, lembaga filantropi atau LSM yang menyediakan pendanaan untuk berbagai macam aktivitas kemanusiaan.

Kesembilan, komunikasi dan media, atau perdamaian melalui informasi. Ini merupakan ranah dari suara rakyat: bagaimana opini publik dibentuk dan diungkapkan melalui media cetak, film, video, dan media sosial lainnya.

2. Faith-Based Diplomacy

Penelitian ini menjadi penting karena beberapa hal: *Pertama*, agama dalam tradisi hubungan internasional terdahulu masih dipandang sebagai suatu yang *rigid*, didominasi oleh empat variabel: karakter pemimpin, identitas negara, kepentingan nasional material, dan desakan kelompok Islam. Sedangkan peran agama sebagai ideasonal berupa norma atau nilai acap kali terabaikan dalam hubungan internasional. *Kedua*, posisi NU sebagai partner pemerintah dalam membentuk kebijakan luar negeri Indonesia tidak hanya berpartisipasi sebagai kontributor, namun juga terlibat dalam implementasi kebijakan.

Atas dasar tersebut, tidak berlebihan sekiranya kalau Islam Nusantara yang diusung NU bisa disebut sebagai identitas nasional, yang menonjolkan watak keberagamaan yang damai dan inklusif. Selain itu juga ada *norm specificity* yang tinggi, yaitu penjelasan tentang bagaimana norma membedakan antara tindakan yang layak dan tidak. Latar historis kolektif tentang kehadiran dan praktek Islam di Indonesia sangat berkontribusi bagi pembentukan tradisi beragama umat Islam Indonesia hari ini. Implikasinya, hal itu menjadi bagian integral identitas nasional. Inilah basis dari konstruktivisme sosial yang menekankan norma yang diaplikasikan dalam masyarakat domestik.⁴⁸

⁴⁸ Andi Purwono, "Islam Moderat Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi", Yogyakarta: UGM, Disertasi, 2018, 91.

Beberapa catatan di atas, menegaskan bahwa *faith-based diplomacy* memiliki kerangka atribut yang merupakan karakteristik untuk memberikan pemimpin dan institusi agama pengaruh yang kuat dalam proses *peacemaking* yang tidak dimiliki oleh aktor diplomasi sekuler, yang menjelaskan bagaimana diplomasi dengan keistimewaan itu digunakan oleh aktor *faith-based diplomacy*.⁴⁹ Ada empat poin penting yang harus dimiliki tokoh *faith-based diplomacy* dalam mengupayakan perdamaian menurut Douglas Johnston, yaitu:

1. Dalam komunitas internal, ia harus memiliki pengaruh yang besar.
2. Harus memiliki status reputasi yang baik dalam kekuatan nonpolitis.
3. Mampu menjadi mediator dan membangun rekonsiliasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik.
4. Mampu menggerakkan masyarakat tingkat nasional maupun internasional untuk mendukung upaya perdamaian yang dilakukan.⁵⁰

Di samping hal tersebut ada empat model intervensi yang dapat dilakukan oleh aktor *faith-based diplomacy* yang diberikan oleh Douglas Johnston, yaitu:

1. Aktor *faith-based diplomacy* mengajak pihak yang berkonflik untuk melihat harapan dan realitas yang terjadi dengan membawa pandangan baru ketika membangun suatu hubungan.

⁴⁹ Douglas Johnston, *Faith-Based Diplomacy: Trumping Realpolitik*, London: Oxford University Press, 2003, 12-14.

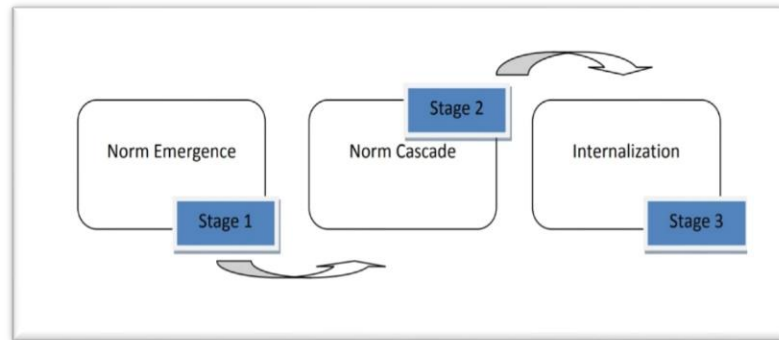
⁵⁰ Ibid.,

2. Aktor *faith-based diplomacy* sebagai jembatan dalam konflik agar dapat menciptakan komunikasi dengan baik untuk memperbaiki hubungan dengan pihak yang berkonflik.
3. Mediasi dilakukan dengan dialog dengan pihak yang berkonflik dengan berbasis spiritual.
4. Aktor *faith-based diplomacy* memulihkan luka sejarah dari pihak yang berkonflik dengan cara rekonsiliasi.⁵¹

3. Model *Norm Life Cycle*

Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menggambarkan bagaimana proses kemunculan norma melalui tiga tahapan di antaranya, *Norm Emergence*, *Norm Cascade*, dan *Internalization*. Setiap proses memiliki peranan masing-masing dalam memunculkan suatu norma hingga dapat bergerak di aras internasional. Agar dapat memahami lebih detail terkait proses *Norm Life Cycle* penulis menyertakan tabel yang berisikan langkah-langkah dalam memunculkan, menyebarkan (difusi) hingga norma tersebut dapat diimplementasikan dalam suatu negara.

⁵¹ Douglas Johnston, *Faith-Based Diplomacy: Trumping Realpolitik* London: Oxford University Press, 2003, 18.



Gambar 1.1

	Stage 1: Norms emergence	Stage 2: Norm cascade	Stage 3 : Norm Internalization
Actors	Norm entrepreneurs with organizational platforms	State, international organizations, networks	Law, professions, bureaucracy
Motives	Altruism, empathy, ideational commitment	Legitimacy, reputation, esteem	conformity
Dominant Mechanism	Persuasion	Socialization, institutionalization, demonstration	Habit, institutionalization

Sumber: Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, *International Norm Dynamics and Political Change*, *International Organization* 52, 4, Autumn 1998, 896.

Berdasarkan tabel diatas, tahapan pertama terdiri dari *Norm Emergence*, dianggap sebagai awal munculnya norma. Norma tidak muncul dengan sendirinya namun terdapat agen yang menginisiasi norma tersebut. Agen yang menginisiasi norma itulah yang disebut sebagai *norm entrepreneurs*.⁵² *Norm entrepreneurs* yang melakukan telaah terhadap suatu isu kemudian menafsirkan isu tersebut sehingga memunculkan alternatif norma dalam memandang apa yang dianggap patut sebagai respon atas isu yang muncul tersebut. Proses reinterpretasi inilah yang disebut sebagai *framing*. Kemudian untuk dapat mengangkat norma tersebut kedalam tahapan internasional aktor membutuhkan wadah seperti organisasi-organisasi yang disebut sebagai *organizational platform*.⁵³ Melalui *organizational platform* maka norma dapat dikembangkan hingga skala internasional. Kemudian sebelum norma pada tahapan kedua, norma akan memasuki titik kritis. Finnemore dan Sikkink mendeskripsikan bahwa titik kritis yang dimaksudkan adalah apakah norma tersebut dapat diterima oleh sebagian besar negara atau ditolak. Dalam tahapan ini dibutuhkan peranan besar dari *norm entrepreneurs* untuk mempersuasi masyarakat internasional agar bersedia mengimplementasikan norma tersebut.

Selanjutnya tahapan kedua disebut sebagai *norm cascade*, pada tahapan ini norma telah memasuki fase penerimaan dari masyarakat internasional. Dalam konteks negara, maka negara tersebut akan menciptakan institusionalisasi untuk

⁵² Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change", *International Organization*, 52, 4, Autumn 1998, 896.

⁵³ Ibid., 899.

memperkuat keberadaan norma tersebut. Keberterimaan norma dalam konteks domestik maka langkah selanjutnya adalah melakukan diseminasi untuk menyebarkan norma agar keberadaan norma lebih berkembang dalam suatu negara. Sarana yang digunakan berupa mekanisme sosialisasi yang aktif antara *norm enterpreuner*, organisasi internasional bahkan organanisasi lokal.⁵⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa jaringan organisasi lokal dianggap sebagai pendukung dari dalam negara itu sendiri. Dengan mengadopsi dan menyebarkan norma internasional maka mereka dapat meningkatkan legitimasi negaranya.

Tahapan ketiga yaitu *internalization*, pada tahapan ini norma sudah diterima secara menyeluruh bahkan dianggap sebagai standar dari perilaku masyarakatnya sehingga setiap individu harus menaati norma tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan dalam realitas sosial mereka.⁵⁵

F. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini akan berusaha untuk menggambarkan, mencatat, dan menganalisa, serta menginterpretasi ragam ide, kegiatan, dan aktor agama yang terlibat dalam *faith-based diplomacy*, sehingga dapat terlihat kepentingan pemerintah Indonesia dan dampak positif yang diperoleh.

1. Analisis data

⁵⁴ Ibid., 902.

⁵⁵ Ibid., 904.

Data-data dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dan melibatkan analisis *cascading* untuk mengartikulasikan pengaruh norma agama dan penyebarannya dalam *faith-based diplomacy*. Selanjutnya, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan diplomasi yang dilatari oleh norma-norma yang ada, dan terakhir, menjelaskan peranan aktor –baik di dalam maupun di luar negeri– dalam mengejawantahkan kegiatan-kegiatan diplomasi yang telah dirumuskan. Dengan begitu, dapat diketahui bagaimana norma-norma mengintervensi proses perumusan kebijakan luar negeri, yang memberi justifikasi bagi para aktor untuk melakukan aksi-aksi diplomasi.⁵⁶

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menempatkan studi wacana untuk mengetahui dinamika ide yang tercermin dari gerakan aktor maupun lembaga, penelitian ini mengumpulkan berbagai wacana dan pemberitaan. Wacana dikumpulkan secara kronologis guna menemukan jejak perjalanan ide menjadi laku sosial. Bagi konstruktivisme, bahasa tidak hanya sebagai alat memahami realita objektif, tetapi untuk memahami bahwa subjek juga memiliki kendali terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana.⁵⁷

Secara teknis, penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian atau serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan

⁵⁶ Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, “International Norm Dynamics and Political Change, International Organization” 4, Autumn 1998, 894.

⁵⁷ Andi Purwono, “Islam Moderat Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi”, Yogyakarta: UGM, 2018, 42.

pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian.⁵⁸ Namun penulis juga menambahkan hasil diskusi dan wawancara dengan beberapa tokoh Nahdlatul Ulama yang menjadi kajian penulis.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer berupa buku-buku yang memuat peta pergerakan Nahdlatul Ulama di kancah internasional (Timteng). Selanjutnya, sumber data sekunder adalah tulisan-tulisan yang terkait dengan topik penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data berupa buku, artikel, majalah, jurnal ilmiah dan lain-lain yang terkait dengan *faith-based diplomacy* NU, penulis mengacu pada langkah-langkah pada umumnya digunakan dalam penelitian kepustakaan (*library research*).

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama dalam penelitian ini adalah latar belakang masalah, menggambarkan secara umum hal-hal yang menjadi keistimewaan penelitian ini dan faktor-faktor ketertarikan dalam pemilihan judul, serta paparan metodologis lainnya. Kemudian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

⁵⁸ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal. 110.

Bab kedua, catatan posisi Nahdlatul Ulama dalam percaturan politik internasional dan Timur Tengah, serta mengeksplanasi strategi Nahdlatul Ulama dalam menangkal arus ekstremisme internasional dan posisi Islam Nusantara sebagai *soft-diplomacy*.

Bab ketiga, dimulai dengan penjabaran mendalam tentang inisiatif-inisiatif *faith-based diplomacy* NU di kancah global, mulai dari penguatan jaringan NU di Timur Tengah hingga penggalakan dialog internasional.

Bab keempat, berisi analisis tentang insiatif-inisiaf diplomasi Nahdlatul Ulama; dari *faith* menuju gerakan diplomasi damai.

Bab kelima, kesimpulan dan saran. Hasil-hasil analisis dan interpretasi dari penelitian dikristalisasi dalam bagian kesimpulan. Adapun saran, mencantumkan tawaran baru bagi penelitian berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa norma-norma domestik sangat terkait dengan mekanisme norma-norma internasional. NU sebagai promotor Islam Nusantara yang dalam hal ini dianggap sebagai *norm entrepreneurs* karena merupakan aktor yang mempersuasi norma Islam Nusantara dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Internalisasi norma tersebut kemudian diposisikan sebagai *treatment* untuk mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Wujud konsistensi NU sebagai organisasi promotor Islam moderat yakni, NU bersama Kementerian Luar Negeri membentuk program-program kolektif: konferensi internasional, gerakan filantropi, diplomasi digital, dan lain-lain. Pada dasarnya, persuasi Islam Nusantara dilakukan NU melalui pendekatan kultural atau *soft diplomacy*. Pendekatan dan strategi yang lebih bersahabat diharapkan lebih efektif untuk mensosialisasikan ide dan norma Islam Nusantara di kawasan Timur Tengah sebagai antitesa dari model keberislaman yang konservatif dan radikal.

Namun demikian, kehadiran norma Islam Nusantara di area Timur Tengah, khususnya, memberi makna beragam bagi negara-negara di sana. Negara seperti Tunisia, Mesir, barangkali tidak memiliki persoalan dengan gagasan Islam Nusantara, namun negara yang berkarakter puritan dan konservatif seperti Saudi dan Iran, sedikit banyak akan memandang hal tersebut sebagai ‘ancaman’,

terutama bagi stabilitas pemerintahannya. Jika mengacu pada pandangan konstruktivis Alexander Wendt, jawabannya adalah karena ada perbedaan ide tentang Islam Nusantara dalam benak Saudi, Iran dan Negara-negara teluk lainnya. Ide bahwa Islam Nusantara merupakan produk dari komunitas Islam pinggiran (*periphery*), yang mampu merendahkan wibawa keislaman di jazirah Arab sebagai pusat Islam.

Peacemaking atau *peacekeeping* Nahdlatul Ulama menegaskan stigma radikalisme dan ekstremisme secara bertahap terhadap Islam, juga mereposisi hubungan Islam dan Barat. Bahkan memberi penegasan bahwa norma/nilai agama secara ideasonal sangat berpengaruh dalam interaksi internasional dan politik luar negeri. Pengarusutamaan norma Islam Nusantara berangkat dari momentum global tersebut, di mana aksi terorisme dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama telah menumbalkan wajah Islam. Peluang ini diambil oleh Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk memberdayakan organisasi-organisasi Islam moderat –NU dan Muhammadiyah–sebagai *trigger* bagi Islam yang damai dan toleran. Langkah-langkah yang diinisiasi oleh NU di antaranya: dialog *interfaith*, aksi kemanusiaan (filantropi), pembentukan PCINU, diplomasi digital, dll. Langkah ini kemudian berdampak terhadap negara-negara di Timur Tengah dan Indonesia. Hal ini dapat dilihat, a) kesepakatan mayoritas aktor *nonstate* di Timur Tengah menjadikan Islam moderat sebagai *platform* utama keberagamaan, b) adanya desakan agar Islam Indonesai dikukuhkan menjadi *role model* keberislaman di saat Timur Tengah mengalami degradasi peradaban yang cukup

implikatif terhadap citra Islam di mata dunia, c) selanjutnya, peluang ini dimanfaatkan Indonesia sebagai *platform* kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Ancaman dihadapi dunia dewasa ini tidak hanya berkutat di sektor militer, namun lebih kompleks lagi menyangkut persoalan ekonomi, sosial-budaya, demokratisasi, HAM, dan lingkungan hidup. Sifat baru ini meniscayakan pendekatan yang baru pula –tidak menoton pada pendekatan militer saja. Dalam konteks ini, instrumen diplomasi agama menjadi hal yang sangat urgen. Aktor agama memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi menyampaikan gagasan-gagasan solutif dan terobosan-terobosan konkrit.

Melalui jalinan kemitraan yang dibangun antara kementerian luar negeri dan NU telah menghasilkan hubungan simbiosis mutualisme dalam rangka penguatan norma Islam Nusantara sebagai tema besar dalam kebijakan luar negeri Republik Indonesia. Melalui pemberdayaan norma tersebut, terciptalah program-program yang bertujuan mendiseminasi atau mensosialisasi narasi Islam moderat dan inklusif, digemakan oleh aktor-aktor yang telah disepakati oleh kedua belah pihak –Kemenlu dan NU. Kondisi ini membuka ruang bagi Indonesia untuk mengeksekusi kepentingannya di manca negara. Sederhananya, *faith-based diplomacy* mampu menguatkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah, juga membuka peluang kerja sama internasional di berbagai sektor: ekonomi, pariwisata, migrasi, pertahanan, dan pendidikan. Hal ini disebabkan *faith-based diplomacy* mampu menggiring kepentingan suatu negara dengan sangat emosional, apalagi bila aktor-aktor yang tampil berasal dari organisasi ternama dan terhormat.

Sebagaimana jamak diketahui, perilaku negara dengan kecenderungan rasionalitasnya berdasarkan kepentingan nasional meniscayakan munculnya ragam medium diplomasi (*second track*) dengan menggandeng aktor-aktor *nonstate* sebagai partner. Melalui *second track*, Indonesia mampu menyalurkan kepentingannya ke suatu negara berbasis *soft diplomacy*. Kesamaan identitas Indonesia dan negara-negara Timur Tengah yang mayoritas beragama Islam telah dimanfaatkan untuk pengembangan wisata halal di Indonesia, bisnis *fashion muslim*, investasi, atau melakukan kerja sama di bidang pendidikan: pendirian pesantren dan pertukaran pelajar. Pada gilirannya, kerja sama yang erat dan *sustainable* tersebut akan menjamin harmonisasi dan perdamaian global.

B. Saran

Kiprah Nahdlatul Ulama di kancah global dengan membawa aspirasi domestik sangat menentukan posisi dan arah politik luar negeri Indonesia. Karenanya, praktik diplomasi agama yang diperankan oleh NU mesti disokong dengan bagan konseptual yang strategis melalui kajian-kajian akademik. Dalam penelitian ini penulis hanya mengeksplanasi sekelumit dari wacana besar NU terkait diplomasi global. Barangkali, pengarusutamaan kajian-kajian seputar diplomasi pendidikan perlu diinisiasi lebih lanjut. Selain itu, eksplorasi terhadap peranan tokoh-tokoh NU terkait gerakan diplomasi di kancah internasional juga perlu dikaji secara komprehensif. Catatan-catatan ini barangkali bisa menjadi rekomendasi bagi peneliti-peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abu-Nimer, Mohammed. *Nirkekerasan dan Bina-Damai Dalam Islam: Teori dan Praktik*, terj. M. Irsyad Rhafsadi dan Khairil Azhar, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- Alami, Athiqah Nur. “Profil dan Orientasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Orde Baru”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 8 No. 2, 2011.
- Al-Hurub, Khalid. *Hamas al-Fikr wa al-Mumarasah*, Beirut: Mu’assasah al-Dirasat al-Filisttiyyahm, 1999.
- Amin, M. Masyhur. *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya* (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996).
- Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Solo: Penerbit Jatayu, 1985.
- Appleby, R. Scott. “The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation”, Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2000.
- Asseburg, Muriel. “The Fatah-Hamas Reconciliation Agreement of October 2017: An Opportunity to End Gaza’s Humanitarian Crisis and Permanently Overcome the Blockade”, *Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)*, German Institute for International and Security Affairs, 2017.

Assyaukanie, Luthfi. "Akar-Akar Legal Intoleransi dan Diskriminasi di Indonesia", *MAARIF Institute*, Vol. 13, No. 2, Desember 2018.

Astuti, Hanum Jazimah Puji. "Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama dalam Bingkai Kultural, *INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*, Vol. 2, No.1, Juni 2017.

Azca, Najib. dkk., *Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Perdamaian dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM, 2019.

Azra, Azyumardi. *Negara Yahudi* (pend.), Mustafa Abd. Rahman, *Dilema Israel*, Jakarta: Kompas, 2002.

Basyuni, Muhammad Muzammil dkk., Ideologi Hamas Gerakan Perlawanan Islam, *Jurnal CMES Volume VIII Nomor 1 Edisi*, 2015.

Bercovitch, Jacob dan S. Ayse Kadayifci-Orellana, "Religion and Mediation: The Role of Faith-Based Actors in International Conflict Resolution", *International Negotiation Koninklijke Brill NV*, Leiden, 2009.

Bokern, Friedrich. "Interreligious Peacebuilding: A New Engagement Of Religious Actors In European Politics?", *Springer European View*, 2009, Vol. 8.

Bruinessen, Martin van. "Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the Conservative Turn," *Institute of Southeast Asian Studies*, 2013.

Burdah, Ibnu. *Konflik Timur Tengah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

_____. *Menuju Dunia Baru Arab: Revolusi Rakyat, Demokratisasi, dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.

Burhani, Ahmad Najib. "Islam Nusantara as a Promising Response to Religious Intolerance and Radicalism", *ISEAS Yusof Ishak Institute*, no. 21.

Burnay, Matthieu, Joelle Hivonnet & Kolja Raube, "Soft Diplomacy and People to People Dialogue between the EU and the PRC", *European Foreign Affairs Review*, Vol. 19 Issue 3/1, January 2014.

CARE, "Afghanistan: Pathways to peace New Directions for an Inclusive Peace in Afghanistan", London, 2012.

Chalik, Abdul. "Fundamentalisme dan Masa Depan Ideologi Politik Islam," *Islamica*, Vol. 9, No. 1, 2014.

_____, "The Position Of Islam Nusantara In Geopolitical Dinamycs Of Islamic World", *Miqot*, Vol. XI No. 2 Juli-Desember 2016.

Chaney, Eric. George A. Akerlof and Lisa Blaydesh, "Democratic Change in the Arab World, Past, and Present", *Spring*, Brookings Institution Press.

Cox, Brian and Daniel Philpott, "Faith-based Diplomacy: An Ancient Idea Newly Emergent", *The Brandywine Review of Faith & International Affairs*, vol 1, no. 2, 2003.

_____, "What Faith-Based Diplomacy Can Offer in Kashmir", *United States Institute of Peace*, no. 55, 2006.

- Dugis, Vinsensio (Ed.). *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*, Surabaya: CSGS, 2016.
- Dwikardana, Sapta. “Transformasi Strategi Diplomasi di Era Digital: Identifikasi Postur Diplomasi Digital di Indonesia”, *LPPM Universitas Katolik Parahyangan*, 2017.
- Fachrudin, Aziz Anwar. “Jokowi and NU: The View from the Pesantren”, *New Mandala*, 11 April 2019, 1. <https://www.newmandala.org/jokowi-and-nu-the-view-from-the-pesantren/> (diakses 16 April 2019).
- Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LkiS, 1998).
- Feillard, Andr  e. *NU vis-  -vis Negara*, Yogyakarta: Basabasi, 2017.
- Finnemore, Martha and Kathryn Sikkin, “International Norm Dynamics and Political Change, *International Organization*” 4, Autumn 1998.
- Foley, Thomas C. “Using Philanthropy For Diplomacy”, *The Ambassadors Review*, Spring, 2008.
- Galtung, Johan. *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*, terj. Asnawi dan Safrudddin, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- Haidar, Ali M. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik*, Jakarta: Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 1991.

Hamilton, Keith. & Langhorne, Rihard. *The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration*, (London: Routledge, 2000).

Hannase, Mulawarman. “Respon Muslim Indonesia Terhadap Gerakan Islamisme Di Timur Tengah: Kasus Hamas dan Konflik Palestina”, *Rausyan Fikr*, Vol. 12 No. 2 Desember 2016.

Hashmi, Sohail, “Interpreting the Islamic ethic of War and Peace”, *The Ethics of War and Peace: Religious and Secular Perspectives*, ed. Terry Nardin. Princeton: Princeton University Press, 1996.

Hopf, Ted. *Social Construction of International Politics: Identities & Foreign Policies, Moscow, 1955 and 1999*, (New York and London: Cornell University Press, 2002).

Hourani, Albert. *Conclusion* dalam Adeed Dawisha (ed.), *Islam in Foreign Policy*, Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

Huntington, Samuel P. *Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Yogyakarta: Qalam, 2006.

_____, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001).

Hosein, Nadirsyah. “Islam Nusantara: Islam Lokal yang Menuju Islam Global?”, *Gatra*, 2 March 2016.

Hwang, Julia Chernov. *Umat Bergerak, Mobilisasi Damai Kaum Islamis Indonesia, Malaysia, dan Turki*, terj. Samsudin Berlian, Jakarta: Freedom Institute, 2011.

- Ida, Laode. *Anatomi Konflik: NU, Elite Islam dan Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).
- J. A. Bill, R. L. Hardgrave, *Comparative Politics*, Ohio: Merill, 1973.
- Jenkins, Garry W. "Soft Power, Strategic Security and International Philanthropy", *North Carolina Law Review*, vol. 85, 773, 2007.
- Jonas Jonson, "Faith-related Diplomacy: An introduction to Nathan Soderblom", *Theology*, vol. 120 (1), 2017.
- Johnston, Douglas. *Faith-Based Diplomacy: Trumping Realpolitik*, London: Oxford University Press, 2003.
- _____, "Faith-Based Diplomacy: Bridging the Religious Divide", *The Wheatley Institution; International Affairs*, US: Brigham Young University, 2009.
- Kant, Immanuel. *Menuju Perdamaian Abadi: Sebuah Konsep Filosofis*, (pendahuluan Frans Magnis Suseno), Bandung: Mizan, 2005.
- Kurniawan, Lutfi J. dkk., *Negara, Civil Society, dan Demokratisasi: Pergerakan Membangun Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan*, Malang: Intrans Publishing, 2008.
- Leira, Halvard. "A Conceptual History of Diplomacy", *Journal The SAGE Handbook of Diplomacy*, 2016.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah*, Bandung: Mizan, 2009.

- Makmun, Khariri. *NU dan Diplomasi Global: Sepak Terjang Kiai Hasyim Muzadi Merespon Isu-Isu Internasional*, Yogyakarta: Pilar Indo Mediatama, 2018.
- Mandan, Arie Mudatsir. (ed.), *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid: Tanggung Jawab Politik NU Dalam Sejarah*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2008.
- Mansbach, Richard W. dan Kirsten L. Raffery, *Pengantar Politik Global*, Bandung: Nusamedia, 2012.
- Masoed, Mochtar. *Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: PAU-SS UGM, 1989.
- Mc Donald, John and Louise Diamond, *Multi-track Diplomacy: A System Approach to Peace*. West Hartford: Kumarian Press, 1996.
- Mc Donald, John W. *Multi-track Diplomacy: A Positive Approach to Peace*, Arlington: Institute for Multi-Track Diplomacy, 2014.
- _____, “The Institute for Multi-Track Diplomacy”, *Journal of Conflictology*, vol. 3, issue 2, 2012.
- Morgenthau, Hans J. *Politics Among Nations*, New York: Knopf, 1978.
- Munir, HM. Rozy. “Buku Laporan International Conference of Islamic Scholars (ICIS), Jakarta: PBNU, 2004.

Munthe, Fredy. "Religious Movements in Humanitarian Issue: The Emergence of Faith-Based Organizations (FBO) in Diplomacy Sphere", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 5 Edisi 2, 2017.

Muzadi, Hasyim. "Buku Laporan International Conference of Islamic Scholars (ICIS), Jakarta: PBNU, 2004.

_____, *Islam Rahmatan Lil'alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia (Perspektif Nahdlatul Ulama)*, dalam pidato ilmiah penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam Peradaban Islam dari IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Desember 2006.

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988).

Notter, James & Louise Diamond, "Building Peace and Transforming Conflict: Multi-track Diplomacy in Practice", *Institute For Multi-Track Diplomacy*, US, 1996.

Nurhisam, Luqman and Mualimul Huda, "Islam Nusantara: A Middle Way?" *Qudus International Journal of Islamic Studies*, Volume 4, Issue 2, August 2016.

Nye, Joseph. "Public Diplomacy and Soft Power", *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 616, Issue 1, March 2008.

_____, *Soft Power: The Mean to Success in World Politics*, New York: Public Affairs, 2004.

- Othman Altwaijri, Abdulaziz. "Islamic Diplomacy at the Service of Dialogue and Peace", *Publications of the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO)*, 2009.
- Prabowo, Wahid. *Hamas: Death Or Freedom*, (Yogyakarta: Palapa, 2013).
- Purwono, Andi. "Organisasi Keagamaan Dan Keamanan Internasional", *Jurnal Politik Profetik*, vol. 2 no. 2 2013.
- _____, "Islam Moderat Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi", Yogyakarta: UGM, Disertasi, 2018.
- Rahman, Musthafa Abd. *Dilema Israel*, Jakarta, Kompas, 2002.
- Riordan, Shaun. "Dialogue-based Public Diplomacy: A New Foreign Policy Paradigm?", *Netherlands Institute of International Relations Clingendael*, No. 95, November 2004.
- Rohman, Abid. "Islam Indonesia dan Diplomasi Soft Power (Studi Kasus Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah)".
- Sahide, Ahmad. *Gejolak Politik Timur Tengah*, Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017.
- Saiman, Arifi. "Islam Nusantara: A Soft Power Diplomacy", *The Jakarta Post*, 18 February 2019.
- Nubowo, Andar. "Jokowi's Soft Diplomacy: Global Islamic Network of Moderation", *RSiS*, No. 119, July 2018.

- Saputra, Inggar. “Peran Indonesia Dalam Membangun Demokrasi di Timur Tengah”, *Prosiding Universitas Indonesia International Seminar Of The Middle East* (UI Isme), 2015.
- Satha-Anand, Chaiwat. *Barangsiapa Memelihara Kehidupan*, Jakarta: PUSAD Paramadina, 2015.
- Scheffler, Thomas. “Interreligious Dialogue and Cultural Diplomacy in the Middle East”, *Congress of DAVO*, 2003.
- Schock, Kurt. “Introduction,” dalam Kurt Schock (ed.), *Civil Resistance: Comparative Perspectives on Nonviolent Struggle*, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015).
- _____, *Civil Resistance Today*, Cambridge: Polity, 2015.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1998.
- Simbolon, Parakitri T. *Menjadi Indonesia, Buku I Akar-Akar Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 1995).
- Smock, David. “Religion in World Affairs: Its Role in Conflict and Peace”, *United States Institute of Peace (USIP)*, 2008.
- Siroj, Said Aqil. *Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, (Bandung: Mizan, 2006).
- Sitohang, Japanton. (Ed.), *Hubungan Indonesia Uni Eropa Penguatan Good Governance*, Jakarta: P2P LIPI, 2006.

Soesilowati, Sartika. "Diplomasi Soft Power Indonesia melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan", *Jurnal Global dan Strategis*, Vol. 9, No. 2.

Sulaiman, Tasirun. *Sang Peace Maker*, Klaten: Real Books, 2017.

Suriasumantri, Jujun S. *Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan*", Dalam Ed. Mastuhu Dan Deden Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu* (Bandung: Kerja sama Nusantara dan PUSJARLIT, 1998).

Wahid, Abdurrahman. *Islamku Islam Anda Islam Kita*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.

W. Bolewski. "Essentials of Modern Diplomacy", *Diplomacy and International Law in Globalized Relations*, Vol 147, 2007.

Westcott, Nicholas. "Digital Diplomacy: The Impact of the Internet on International Relations", *Oxford Internet Institute Research Report*, 16 July 2008.

Wight, Martin. *International Theory: Three Traditions*, USA: Hollmes & Meier, 1991.

Wirajuda, Hasan. *Membangun Citra Indonesia Yang Demokratis, Moderat Dan Progresif: Konsolidasi Soft Power dan Aset Politik Luar Negeri*, Jakarta: Pidato Menteri Luar Negeri, 2006.

_____, *The Impact of Democratisation on Indonesia's Foreign Policy: Regional Cooperation, Promotion of Political Values, and Conflict*

Management, PhD Thesis, London School of Economics and Political Science.

Yusuf, Slamet Effendy. “Perumusan Negara Masa Khittah: Pancasila Sebagai Ideologi Final”, *Jurnal Tashwirul Afkar*, no. 27, 2009.

Zada, Khamami. “Khittah Politik Kenegaraan NU”, *Jurnal Tashwirul Afkar*, no. 27, 2009.

Internet/Website

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/07/27/ns5hd4313-alasan-pbnu-angkat-tema-muktamar-teguhkan-islam-nusantara> (diakses 01 April 2019).

<http://www.nu.or.id/post/read/99853/respons-pbnu-atas-pernyataan-dubes-saudi-terkait-kicauannya-di-twitter> (diakses 10 April 2019).

<http://www.nu.or.id/post/read/104012/satu-abad-diplomasi-perdamaian-nu> (diakses 1 April 2019).

<http://www.nu.or.id/post/read/104012/satu-abad-diplomasi-perdamaian-nu> (diakses 1 April 2019).

<http://www.nu.or.id/post/read/103980/pcinu-lebanon-gelar-istighotsah-harlah-ke-96-nu-di-empat-kota> (diakses 02 April 2019).

<http://www.nu.or.id/post/read/86986/pentas-budaya-puncaki-peringatan-harlah-nu-di-tunisia> (diakses 2 April 2019).

<http://www.nu.or.id/post/read/98644/pcinu-dan-muslimat-nu-sudan-gelar-bakti-sosial-> (diakses 04 April 2019).

<http://www.nu.or.id/post/read/98644/pcinu-dan-muslimat-nu-sudan-gelar-bakti-sosial-> (diakses 04 April 2019).

<http://baytarrahmah.org/purpose/> (diakses 07 April 2019).

<http://libforall.org/who-we-are/> (diakses 09 April 2019). Lih.

<http://www.ahram.org.eg/NewsQ/405320.aspx>.

<https://www.dw.com/en/indonesian-cleric-islamic-re-contextualization-needed-for-israel-palestine-peace/a-44440741> (diakses 09 April 2019).

<http://www.nu.or.id/post/read/67119/islam-nusantara-dan-9-langkah-penting-perjuangan-internasional> (diakses 10 April 2019).

<https://www.nucare.id/tentang> (diakses 04 April 2019).

<http://www.nu.or.id/post/read/33047/burhanuddin-rabbani-ingin-pbnu-bantu-afganistan> (diakses 5 April 2019)

<http://www.nu.or.id/post/read/68070/nu-diminta-jadi-penengah-solusi-perdamaian-> (diakses 20 Maret 2019)

<http://www.nu.or.id/post/read/68092/inilah-naskah-lengkap-deklarasi-nahdlatul-ulama-kepada-dunia> (diakses 20 Maret 2019)

<http://www.nu.or.id/post/read/90281/ini-deklarasi-ulama-indonesia-pakistan-dan-afghanistan-di-bogor> (diakses pada 04 April 2019).

<http://numuda.id/2018/05/bogor-declaration-of-peace/> (diakses 22 Maret 2019)

<https://www.nucare.id/berita/internasional/pbnu-tanggapi-tragedi-kemanusiaan-di-yaman> (diakses 04 April 2019).

<https://www.nucare.id/berita/internasional/selamatkan-eti-dari-eksekusi-mati> (diakses 06 April 2019).

<https://www.dutaislam.com/2018/07/ustaz-hilmi-bilang-tak-ada-islam-nusantara-gus-nadir-tanggapi-ini-bisa-jawab.html> (diakses 30 Maret 2019).

<http://www.nu.or.id/post/read/82089/fatah-dan-hamas-rekonsiliasi-rakyat-palestina-bersuka-ria> (diakses 20 Maret 2019).

<http://www.arabnews.com/node/1177156/saudi-arabia> (diakses 20 Maret 2019).

<https://www.middleeastmonitor.com/20181201-fatah-closes-door-to-reconciliation-with-hamas/> (diakses 02 April 2019).

<http://www.nu.or.id/post/read/93104/nu-agama-negara> (diakses 07 April 2019).

The Economist, “In God’s Name”, November 1, 2007.

<http://numuda.id/2018/05/bogor-declaration-of-peace/> (diakses 03 April 2019).

<http://www.nu.or.id/post/read/97805/nu-sudan-kenalkan-kitab-ulama-nusantara-di-pameran-buku-internasional> (diakses 03 April 2019).

http://parstoday.com/id/news/indonesiai30787cintai_indonesia_wni_di_iran_peringatan_haul_gus_dur (diakses 30 Maret 2019).

<https://international.sindonews.com/read/1053443/43/iran-indonesia-sepakat-gaungkan-islam-sebagai-agama-cinta-damai-1444915830> (diakses 20 Maret 2019).

Taiwan News, “Indonesian Cleric: ‘Islamic Recontextualization’ Needed for Israel-Palestine Peace”, 28 Juni 2018. (diakses 01 April 2019).

<https://www.middleeasteye.net/opinion/israeli-elections-how-palestinians-can-find-unity-wake-joint-list-collapse> (diakses 07 April 2019).

<https://news.detik.com/kolom/d-3194614/digital-diplomacy-sebuah-kebutuhan-mendesak> (diakses 01 April 2019).

<http://www.nu.or.id/post/read/104012/satu-abad-diplomasi-perdamaian-nu>

(diakses 03 April 2019).

Proceedings ICIS, “*Upholding Islam as Rahmatan li Al-‘Ālamīn*”, Jakarta, JCC 23-25 Februari 2004.

Buku Laporan International Conference of Islamic Scholars (ICIS), Jakarta: PBNU, 2004.

Outlook Consultation Forum For Peace in Afghanistan, 18-19 July 2011.

Outlook NUCARE-LAZISNU 2019, “Energy of Zakat: Berkidmat Membangun Pembaharuan Ekonomi Umat”, LAZISNU, Jakarta, 2019.

Wawancara

Wawancara Purkon Hidayat, Koordinator Gusdurian Tehran, 12/03/2019 via WhatsApp.

Wawancara Langsung KH. Yahya Cholil Staquf (26 Maret 2019) di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang.

Wawancara Muhammad Luqman Hambali, Syuriyah PCINU Sudan, 12/03/2019 via WhatsApp.

Wawancara Ilman M. Abdul Haq, Ketua Tanfidziyah PCINU Mesir (2016-2018), 14/03/2019 via WhatsApp.

Wawancara Iib Hibaturohman, Ketua Tanfidziyah PCINU Tunisia, 13/03/2019 via WhatsApp.

Wawancara langsung Ketua NU-CARE LAZISNU Achmad Sudrajat, Lc. MA., (01 April 2019 di Kantor PBNU Pusat Jakarta).